

**KERJASAMA INDONESIA – *END CHILD PROSTITUTION IN ASIAN
TOURISM* (ECPAT) DALAM MENANGANI MASALAH EKSPLOITASI
SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (ESKA) DI SEKTOR PARIWISATA
INDONESIA**

RESUME



Disusun Oleh:

Valentina Oki Yovita

NIM : 151070024

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA**

2011

BAB I PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu industri yang memberikan kontribusi besar dalam peningkatan pendapatan dan ekonomi sebuah negara, namun di lain sisi merupakan sektor yang patut diwaspadai pula, melihat semakin meningkatnya praktek-praktek transaksi seksual di daerah wisata yang tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga anak-anak yang dikenal dengan istilah PSA (Pariwisata Seks Anak). Dalam prakteknya, sektor-sektor usaha terkait seperti biro perjalanan, penginapan, tempat-tempat hiburan lainnnya secara langsung maupun tidak langsung memiliki peran yang cukup besar dalam peningkatan praktek kejahatan ini, namun di sisi lain dapat juga menjadi aspek kunci dalam penanggulangannya.

Maraknya masalah ESKA menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia dan juga kesadaran masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu Indonesia merasa perlu untuk melakukan suatu kerjasama dengan sebuah lembaga yang memiliki fokus perhatian pada masalah ESKA, yaitu *End Child Prostitution in Asian Tourism* (ECPAT) yang merupakan INGO dengan fokus masalah pada perlindungan hak-hak anak terutama terhadap segala bentuk eksploitasi seksual komersial.

Dalam upaya penanggulangan masalah ESKA ini, ECPAT berperan sebagai pihak pemberi bantuan luar negeri berupa bantuan teknis, bantuan dalam pengawasan program nasional, usaha-usaha advokasi dan kampanye ESKA. Dalam pelaksanaan program-programnya, ECPAT tidak lupa untuk menjalin kerjasama baik dengan pemerintah Indonesia maupun dengan organisasi-organisasi non pemerintahan sebagai jaringan ECPAT maupun yang bukan jaringan ECPAT. Dari kerjasama inilah diharapkan praktek ESKA yang terjadi di Indonesia dapat tertangani dan mengalami penurunan, selain itu karena ECPAT

merupakan INGO yang berfokus pada masalah ESKA, dianggap sebagai patner yang tepat untuk menjalankan berbagai program penanggulangan ESKA.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ECPAT (*END CHILD PROSTITUTION IN ASIAN TOURISM*) DAN KONDISI ESKA DI INDONESIA

Fenomena eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) merupakan masalah serius yang semakin lama semakin marak ditemui di Indonesia, terutama di daerah perbatasan, daerah perdagangan, dan daerah pariwisata. Namun di sisi lain, masalah ESKA sulit terindikasi karena pada umumnya dilakukan secara tertutup dengan transaksi-transaksi yang sulit diungkapkan.

Oleh karena itu, perlunya kerjasama antar Indonesia dan lembaga pemerhati masalah ESKA yang kemudian pada tahun 2005 Indonesia secara resmi bergabung dalam jaringan ECPAT internasional¹. Atas dasar komitmen untuk bekerja bersama menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), pada tahun 2000 diselenggarakan konsultasi nasional untuk membentuk sebuah organisasi jaringan atau koalisi dalam rangka menghapuskan perdagangan seks anak, pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata seks anak dan perkawinan anak.

Konsultasi nasional menyepakati adanya kerjasama dengan Indonesia melalui jaringan ECPAT Internasional di Indonesia yaitu Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (KONAS PESKA). Setelah melalui proses kerja yang panjang dan aplikasi yang dilakukan ke ECPAT untuk mendapat pengakuan tingkat internasional, pada tanggal 6 Desember 2004, Koalisi Nasional

¹ “ECPAT Directory: East Asia and the Pasific ”.
http://www.ecpat.net/ei/Ecpat_directory.asp?id=78&group ID=3 diakses tanggal 28 Mei 2011

kembali menggelar pertemuan nasional dengan menghadirkan Carmen M. Madrinan yang menjabat sebagai *Executive Director ECPAT International* dan juga Natasha Sen yang menjabat sebagai *Associate Legal Officer ECPAT International* pada saat itu. Pada pertemuan itu ECPAT International memutuskan melalui Koalisi Nasional disepakati kerjasama ECPAT – Indonesia dan Indonesia menjadi anggota resmi ECPAT International, dengan status *affiliate member of ECPAT International* yang saat ini disebut *ECPAT affiliate group Indonesia*. Keputusan penerimaan sebagai *ECPAT affiliate group Indonesia* disahkan melalui sertifikat internasional yang diterbitkan langsung oleh ECPAT setahun kemudian yaitu tepatnya tertanggal 8 September 2005.²

Saat ini, *ECPAT affiliate group Indonesia*, sebagai sebuah jaringan nasional dari sejumlah organisasi dan individu diperkuat oleh lebih dari 20 anggota di lebih dari 10 propinsi di Indonesia. *ECPAT affiliate group Indonesia* berkomitmen untuk memperkuat aksi nasional dalam upaya mencegah dan menghapuskan ESKA di Indonesia dengan membangun kolaborasi bersama pihak-pihak kunci lintas sektor seperti lembaga masyarakat sipil untuk hak anak, akademisi, para ahli, badan pemerintah, sektor swasta, badan internasional dan banyak lagi. Kehadirannya adalah untuk memastikan masyarakat dan pemerintah melakukan langkah-langkah serius dalam menangani kejahatan ini.

Hal yang paling utama dalam penanggulangan masalah ESKA adalah komitmen politik yang tinggi dari pemerintah dan kontinuitas terhadap program-

² “Siapa Kami: Koalisi Nasional Penghapusan ESKA”.

http://www.eska.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=75 diakses tanggal 7 Juni 2011

program yang telah dibentuk. Keberadaan ECPAT telah membantu pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedua unsur tersebut.

Penurunan kasus ESKA di daerah-daerah khususnya daerah pariwisata yang menjadi tujuan pengiriman anak-anak korban ESKA sebagai langkah nyata oleh pemerintah Indonesia - ECPAT bersama dengan organisasi-organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Dilihat dari segi kuantitas aksi-aksi yang telah dilakukan ECPAT memang belum banyak dan pemerintah Indonesia sendiri belum dapat memaksimalkan keberadaan ECPAT di Indonesia dan kendala-kendala cultural di Indonesia sendiri yang sedikit menghambat aksi-aksi ECPAT.

BAB III KONDISI UMUM ESKA DI INDONESIA DAN LANGKAH-LANGKAH KERJASAMA YANG DILAKUKAN INDONESIA – ECPAT DI SEKTOR PARIWISATA

Masalah ESKA di Indonesia semakin hari semakin marak dan memprihatinkan. Anak-anak sekarang tidak hanya dipekerjakan di sektor industri atau perkebunan tetapi (terutama perempuan), seringkali dipaksa menjadi pekerja seks komersial atau yang lebih dikenal dengan istilah ESKA. “Anak-anak” disini berarti perempuan yang masih berusia kurang dari 18 tahun. Seharusnya tidak ada alasan untuk mempekerjakan mereka, apalagi sebagai pekerja seks komersial. Layaknya mereka masih bersekolah, mempunyai waktu setiap hari untuk bermain, dan pendapatannya ditanggung orang tua.

Dibeberapa lokalisasi dan tempat-tempat hiburan, anak yang dilacurkan ada hampir di setiap sudut. Bisa dibayangkan sejak usia berapa anak tersebut dipekerjakan sebagai pekerja seks, karena berdasarkan perjalanan penyakit (tanpa

pengobatan), seseorang baru menunjukkan gejala spesifik HIV setelah 5 sampai 10 tahun terinfeksi. Hal ini menunjukkan upaya pencegahan dan penanganan korban ESKA harus dilihat dari berbagai sisi.

Eksplotasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di dunia khususnya di Indonesia sangat memprihatinkan karena meningkat tiap tahunnya. Fenomena Eksploitasi Seksual Anak (ESKA) bagaikan fenomena gunung es yang sulit untuk ditangani dimana dalam aksinya, setiap pelaku yang melakukan Eksploitasi Seksual Anak menggunakan berbagai cara atau modus operandi untuk dapat membujuk korban. Fenomena eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) merupakan masalah serius yang semakin lama semakin marak ditemui di Indonesia, terutama di daerah perbatasan, daerah perdagangan, dan daerah pariwisata. Anak-anak, terutama perempuan berumur 13-18 tahun kerap menjadi obyek perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual komersial. Namun disisi lain, masalah ESKA sulit terindikasi karena pada umumnya dilakukan secara tertutup dengan transaksi-transaksi yang sulit diungkapkan. Tindakan ESKA juga berkaitan dengan adanya daerah pengirim, penerima, dan daerah transit seperti yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Daerah Pemasok Anak-anak Perempuan yang diterjunkan
ke Industri Seks Komersial di Indonesia

Provinsi	Daerah
Jakarta	Daerah-daerah sekitar Jakarta
Jawa Timur	Jember, Banyuwangi, Situbondo, Sampang (Madura), Gresik dan Nganjuk
Jawa Tengah	Jepara, Pati, Purwodadi-Grobogan, Pekalongan, Banyumas, Cirebon, Wonogiri, Semarang, Solo, Wonogiri, Pemalang dan Boyolali
Jawa Barat	Indramayu, Garut, Sukabumi, Kerawang, Banjarnegara, Bandung, Subang, Bogor, Bandung, Sukabumi, Cianjur, Cirebon, dan Bekasi

Lampung	Desa-desa di sekitar Lampung
Sumatera Barat	Pariaman
Pontianak	Singkawang
Sumatera Utara	Kec. Tembung, Kec. Belawan, Binjai, Belawan, Medan
Sulawesi Utara	Manado
Sulawesi Tenggara	Kendari
Daerah lain di luar Pulau Jawa	Palembang, Makasar, Bali, dan Samarinda

Sumber: Irwanto, *Perdagangan Anak di Indonesia*, ILO, 2001, hal 52

Dari daerah-daerah itulah nantinya korban ESKA akan dikirim ke daerah-daerah tujuan wisata seperti Bali, Lombok, dan Batam untuk dijadikan objek seksual oleh para wisatawan baik lokal maupun domestik.

Dalam upaya menghapus keterlibatan anak dalam wisata seks diperlukan sinergisitas semua pihak untuk mendukungnya, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dunia swasta, masyarakat, pihak keluarga, maupun organisasi dan LSM yang peduli terhadap permasalahan tersebut yang dalam hal ini adalah ECPAT. ECPAT adalah sebuah jaringan organisasi dan individu yang bekerja bersama-sama untuk menghapuskan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA). Saat ini, para afiliasi dan kelompok nasional ECPAT hadir di lebih dari 70 negara dan melaksanakan berbagai macam program untuk menentang ESKA.

Indonesia memandang bahwa ECPAT merupakan patner yang dianggap memiliki kemampuan dan kecakapan dalam penanganan masalah ESKA yang tidak dimiliki pemerintah. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam bentuk dukungan non-finansial, misalnya dengan melakukan pelatihan.

Dalam prakteknya, ECPAT telah melakukan kerjasama dengan dua lembaga pemerintah terkait masalah ESKA, yaitu antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-ECPAT untuk program pengumpulan data

ESKA di 6 kota besar (Indramayu, Manado, Medan, Semarang, Solo, dan Surabaya) dan antara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata-ECPAT untuk program konferensi Asia Tenggara tentang Pariwisata Seks Anak.

Dalam menangani masalah ESKA, pemerintah bersama ECPAT menentukan langkah-langkah dengan cara membentuk jaringan kerjasama antara pemerintah pusat melalui pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga afiliasi ECPAT di beberapa provinsi. Lembaga-lembaga ini selanjutnya akan bergerak bersama pemerintah daerah dalam tindakan penanganan maupun pencegahan ESKA. Lembaga-lembaga tersebut antara lain: Institut Perempuan Bandung, Kakak Solo, Kawan Kami Surabaya, KKSP Medan, LBH APIK Pontianak, Perkumpulan Pancakarsa NTB, Rumah Perempuan Kupang NTT, KJHAM Semarang, Samin Yogyakarta, dan YAP (Yayasan Anak dan Perempuan) Jakarta. Langkah selanjutnya adalah Mekanisme Hukum melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.30/HK.201/MKP/2010 tentang Pedoman Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata; serta Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak (RAN PTTPO dan ESA).

BAB IV AKTIVITAS ECPAT - INDONESIA DALAM MENANGGULANGI MASALAH ESKA DI SEKTOR PARIWISATA

Langkah-langkah yang telah dibentuk antara ECPAT dan Indonesia dalam penanggulangan masalah ESKA di sektor pariwisata kemudian diimplementasikan dalam bentuk program kerja yang dibagi dalam program

jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut didukung dengan adanya program kerja bersama.

Pada pelaksanaannya program-program tersebut memiliki faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah partisipasi aktif dari masyarakat setempat serta adanya koordinasi antara ECPAT dan jaringan ECPAT di daerah. Faktor penghambat berjalannya program kerja tersebut antara lain birokrasi dan tingkat pendidikan yang rendah.

Kerjasama antara ECPAT-Indonesia memberikan kontribusi positif terhadap perubahan jumlah kasus ESKA yang terjadi di Indonesia. Dari awal kerjasama hingga tahun 2008 mengalami penurunan jumlah kasus ESKA, selain itu dengan adanya pendataan jumlah pekerja seksual akan membantu pemerintah setempat untuk menemukan solusi penanganan dan pencegahan masalah ESKA. Data tersebut diperoleh berdasarkan data yang dihimpun dari tiap-tiap jaringan ECPAT di beberapa daerah. Hasil lain adalah diadakannya Konferensi Asia Tenggara tentang Pariwisata Seks Anak. Konferensi ini menghasilkan sebuah dokumen kesepakatan bersama yang dinamai: “Komitmen dan Rekomendasi Bali Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak dalam Pariwisata”. Dokumen ini berisikan himbauan dan ajakan pada segenap pihak, negara-negara anggota ASEAN, pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil dan badan internasional baik di tingkat nasional maupun regional untuk bersama-sama menyatakan perang terhadap pariwisata seks anak dan memaksimalkan usaha-usaha pencegahan dan penghapusannya dengan melakukan kerjasama bilateral antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

BAB V KESIMPULAN

Eksplorasi seksual komersial terhadap anak telah menjadi kekerasan kultural dan struktural. Kesulitan perlindungan anak korban ESKA merupakan kesulitan sistemik. Kompleksitas ini tidak terlepas dari budaya patriarki, dengan cara pandang hipokrit dalam melihat dua kutub, yakni keuntungan bisnis dan moralitas yang dipersempit menjadi hanya sekedar perempuan dan seks.

Kerjasama yang terjalin antara ECPAT-Indonesia memberikan kontribusi positif terhadap perubahan jumlah korban ESKA di Indonesia. Hal yang paling utama dalam penanggulangan masalah ESKA adalah komitmen politik yang tinggi dari pemerintah dan kontinuitas terhadap program-program yang telah dibentuk. Keberadaan ECPAT telah membantu pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedua unsur tersebut.

Penurunan kasus ESKA di daerah-daerah khususnya daerah pariwisata yang menjadi tujuan pengiriman anak-anak korban ESKA sebagai langkah nyata oleh pemerintah Indonesia - ECPAT bersama dengan organisasi-organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Dilihat dari segi kuantitas aksi-aksi yang telah dilakukan ECPAT memang belum banyak dan pemerintah Indonesia sendiri belum dapat memaksimalkan keberadaan ECPAT di Indonesia dan kendala-kendala kultural di Indonesia sendiri yang sedikit menghambat aksi-aksi ECPAT.